

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor : 071/I13/E/Kpts/1995

tentang  
Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Membaca : Surat permohonan dari **Pengurus Jama'ah Pengajian Al Huda** .  
tanggal : **20 September 1994** Nomor : **002/IX/JPA/1994**

Menimbang : a. bahwa masyarakat di daerah tersebut memerlukan  
adanya Lembaga Pendidikan;  
b. bahwa di daerah tersebut dipandang memenuhi  
syarat untuk didirikan Sekolah Swasta baru

Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:  
1. tanggal 22 November 1992 Nomor 0374/U/1992;  
2. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1993;  
3. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983;  
4. tanggal 14 Juni 1984 Nomor 0262/O/1984;  
5. tanggal 7 Agustus 1992 Nomor 0227/C/1992;  
b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan  
Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I.83;  
c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen  
Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa  
Yogyakarta tanggal 22 Desember 1993 Nomor :  
074/F/1993

Memperhati-  
kan : 1. Pendapat Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan  
Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya **SLEMAN**  
tanggal : **4 Januari 1995** Nomor : **044/I13.5/A/94** .  
2. Pertimbangan Kepala Bagian Perencanaan Kantor  
Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal :  
**31 Maret 1995** Nomor : **113/I13.II/I/95**  
3. Pertimbangan Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kantor  
Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal:  
**15 April 1995** Nomor : **151 /I13.VI/I/95** .

M E M U T U S K A N

Menetapkan  
Pertama : Memberikan persetujuan kepada **Pengurus Jama'ah Pengajian Al Huda**  
untuk membuka Sekolah Swasta :

- a. Nama Sekolah : **TK AL HUDA**
- b. A l a m a t : **Pulerejo , Bokoharjo , Prmbanan , Sleman** .
- c. Jumlah kelas : **1 Kelas** .
- d. Jumlah murid : **25 Anak** .
- e. Tahun Pelajaran : **1995 / 1996** .

Kedua

: Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah;
2. Sekolah Swasta yang akan didirikan harus memenuhi dan melengkapi persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Surat persetujuan ini hanya berlaku bagi jenis dan jenjang sekolah , tempat , mulai kelas satu pada tahun pelajaran sebagaimana tercantum dalam surat persetujuan ini , dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain ;
4. Sekolah Swasta yang bersangkutan , harus melaporkan keadaan dan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta u.p. Kepala Bidang Pendidikan Dasar dengan tembusan Kepala Bagian Perencanaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta , selambat-lambatnya 3 ( tiga ) bulan sejak dimulainya Tahun Pelajaran 1995 / 1996 .

Ketiga

: Persetujuan pendirian Sekolah Swasta ini akan batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun, Penyelenggara Sekolah/Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini , akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 18 April 1995

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Kantor Wilayah  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi  
Daerah Istimewa Yogyakarta



Drs. SOETOPO SAHIB  
★ NIP 130439125

TEMBUSAN YTH :

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta
2. Irjen Depdikbud di Jakarta
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
4. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
5. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Propinsi DIY
6. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Propinsi DIY
7. Kepala Kandep Dikbud Kabupaten /Kotania se Propinsi DIY
8. Kepala Sekolah Swasta yang bersangkutan